

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KORAN TEMPO  
Subyek :  
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 25/02/2009  
Hari : Rabu  
Halaman : A8

### **KASUS PERAMBAHAN HUTAN SUNGAI AUR** **Warga Minta KPK Ambil Alih**

Warga Jambi melalui Jaringan Masyarakat Antikorupsi (Jarak) Jambi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih pengusutan kasus alih fungsi hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sungai Aur, Muarojambi.

"KPK diminta mengambil alih, terutama yang menyangkut indikasi korupsi," kata Ketua Jarak M. Hasan kepada *Tempo* kemarin. Alasannya, kata Hasan, ada indikasi polisi tidak serius menangani kasus ini.

"Hingga sekarang belum ada upaya untuk menyentuh otak pelaku," ujar Hasan. Surat Jarak yang dikirim ke Kepolisian Daerah Jambi pada 13 Januari lalu juga belum ditanggapi.

Untuk mempercepat proses pengusutan yang dilakukan KPK, Jarak mengaku telah mengirim berkas ke KPK di Jakarta. "Kami kirim pada 20 Februari lalu, agar lembaga itu mau mengambil alih pengusutannya," ujar Hasan.

Menurut Hasan, kasus ini layak ditangani KPK karena indikasi adanya unsur korupsi besar sekali. Bupati Muarojambi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muarojambi, ujarnya, harus bertanggung jawab atas masalah ini. "Mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja."

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Jambi, yang melakukan investigasi, mengungkapkan, pada 2008 lahan Tahura Sungai Aur telah dibabat sekitar 327 hektare untuk pembangunan 131 unit rumah transmigran asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jambi.

Pada kasus ini, menurut Hasan, ada dua hal yang dilanggar, yakni masalah pembalakan liar, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta dugaan unsur korupsi.

Kasus perambahan Tahura, dia menambahkan, lebih serius daripada kasus Tanjung Siapi-api, Sumatera Selatan, atau kasus alih fungsi lahan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Alasannya, "Di Muarojambi mereka membabat hutan lindung tanpa terlebih dulu ada upaya alih fungsi," kata Hasan.

Juru bicara KPK, Johan Budi, menyatakan belum menerima permintaan pengambilalihan kasus korupsi Tahura Sungai Aur. "Sampai saat ini KPK belum menerima berkas tersebut," ujar Johan kepada *Tempo* kemarin. Menurut Johan, KPK dapat mengambil

KPK harus melihat kasusnya terlebih dulu. "Jika memang ada indikasi korupsi dan memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang, KPK bisa mengambil alih," ujar Johan.

Kepala Kepolisian Resor Muarojambi Ajun Komisaris Besar Tedjo Dwikora membantah. "Tidak benar kami dituding tidak serius," kata Tedjo. Buktinya, kata dia, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. "Kami akan serius dan tidak akan main-main dalam menanganinya," ujarnya. Dia telah menangkap serta menetapkan Kamiluddin, Benot, Suhendro, dan Karto sebagai tersangka.

Menurut Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir, proyek ini merupakan program nasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 sebesar Rp 6,7 miliar untuk 450 keluarga transmigran.